

KEPENTINGAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TERHADAP ADOPSI INTERNASIONAL SEBAGAI BANTUAN KEMANUSIAAN: TINJAUAN ERA PEMERINTAHAN GEORGE WALKER BUSH 2001-2009

Florentina Yasinta Jehanu

Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: florentinayasintajehanu@gmail.com

ABSTRAK

Adopsi internasional merupakan fenomena yang melibatkan dari tingkat individu hingga lintas negara, sehingga berperan penting, baik bagi negara maupun perpolitikan internasional. Di antara negara-negara Barat lainnya, Amerika Serikat adalah negara penerima terbesar adopsi internasional yang konsisten dengan jumlah penerimaan lebih dari lima puluh persen dari total adopsi internasional global setiap tahunnya. Oleh karena itu, kepentingan Pemerintah Amerika Serikat terhadap adopsi internasional menarik untuk diteliti. Diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab yang mendorong Pemerintah Amerika Serikat terbuka dan menjadi promotor dalam adopsi internasional. Penulis mengajukan dua argumentasi penelitian bahwa Pemerintah Amerika Serikat menggunakan adopsi internasional untuk kepentingan ideologi serta sebagai wujud diplomasi publik untuk menciptakan citra positif kepada pemerintah negara lain dan masyarakat dunia. Konsistensi Amerika Serikat tersebut menunjukkan bahwa adopsi internasional merupakan bantuan kemanusiaan yang memberikan efek ekstra menguntungkan bagi Amerika Serikat karena tidak hanya mendapatkan citra positif di hadapan publik, adopsi internasional dapat menjadi sarana bagi Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasionalnya di negara-negara asal anak adopsi. Untuk membuktikan argumentasi tersebut, penulis menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu Bantuan Kemanusiaan dan Diplomasi Publik dengan jangkauan penelitian di era Pemerintahan George Walker Bush tahun 2001-2009. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi yang menggunakan teknik analisis konten untuk mengonfirmasi argumentasi penelitian.

Kata-kata kunci: *Adopsi Anak Internasional, Bantuan Kemanusiaan, Negara Penerima Adopsi Internasional, Pemerintah Amerika Serikat, Diplomasi Publik.*

ABSTRACT

International adoption is a phenomenon that involved various actors, from individual level to government level, so this phenomenon have important roles for country and international politics. Among other Western Countries, United States of America is the biggest receiving country of international adoption who consistently received more than fifty percent of total global international adoption per year. Therefore, United States of America government interests towards international adoption is interesting to be inspected. Further explanations are required to know causal factors that prompted the United States of America Government promotes international adoption. The author proposes two research arguments that the United States of America Government uses international adoption for the sake of ideology and as a form of public diplomacy to create a positive image for the governments of other countries and the world community. The consistency of the United States of America Government shows that international adoption is a humanitarian assistance that provides extra beneficial effects to the United States of America because it is not only gets positive image in public, international adoption can become a tool for the United States to achieve its national interest in the sending countries.

The author use two frameworks, the humanitarian assistance and public diplomacy with research outreach in the era of George Walker Bush. This research is an exploratory research using content analysis techniques to confirm the research argumentation.

Keywords: *International Child Adoption, Humanitarian Assistance, Receiving Countries of International Adoption, United States Government, Public Diplomacy*

Pendahuluan

Adopsi Internasional (AI) sebagai bantuan kemanusiaan diprakarsai oleh negara-negara Barat sebagai bentuk respon terhadap perang dan krisis paska Perang Dunia Kedua (Groza, 2013:45; Lovelock, 2000:907; Masson, 2001:142; Selman, 2002:212; Selman, 2015:312). Tidak hanya melibatkan antar pemerintah saja, namun juga melibatkan para misionaris, agen adopsi, dan warga negara. Oleh karena merespon perang dan krisis, anak-anak adopsi merupakan anak-anak yatim piatu ataupun terlantar yang menjadi korban perang. Sejak bermula di akhir Perang Dunia Kedua, jumlah AI terus bertambah dan mengakibatkan perpindahan anak yatim piatu (*orphan immigration*) dalam jumlah besar dari negara miskin menuju negara kaya (Altstein dan Simon, 1991; Brookfield dalam Willing, et.al., 2012; Lovelock, 2000; Masson, 2001; Selman, 2002; Young, 2012).

Setelah Perang Dunia Kedua, AI juga merespon peperangan lainnya, yaitu Perang Korea di tahun 1950-1953 dan Perang Vietnam di tahun 1962-1975. Berlanjut dari peperangan tersebut, AI merespon krisis ekonomi dan demografi negara-negara Timur di akhir Perang Dingin (Lovelock, 2000; Masson, 2001; Selman, 2002; UNICEF, 2015; Young, 2012). Meskipun bermula dari altruisme, AI bertransformasi menjadi bantuan kemanusiaan yang juga menguntungkan bagi calon orang tua angkat/*prospective adoptive parent* (PAP) akibat penurunan Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) yang dialami oleh masyarakat Barat. Kebutuhan terhadap pembentukan keluarga meningkatkan jumlah AI secara global hingga memuncak di tahun 2004. Fenomena AI yang berkembang pesat rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga di tahun 1993 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Hague Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption (HCIA) dengan prinsip utamanya adalah *best interest of the child*.

Setelah memuncak di tahun 2004, terjadi penurunan jumlah AI global secara signifikan sejak tahun 2005. Di negara-negara pengirim, pengurangan ketersediaan anak untuk AI disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kondisi aging population, isu-isu domestik, *national pride*, arahan pemerintah untuk meningkatkan adopsi domestik di masyarakat, serta adanya preferensi politik tersendiri (Budiman dan Lopez, 2017; Young, 2012). Sedangkan berkurangnya jumlah PAP disebabkan oleh penerapan HCIA ke dalam hukum nasional sehingga persyaratan AI semakin sulit dijangkau oleh para PAP. Penurunan di tahun 2005 membawa jumlah AI serupa dengan tahun 2001, namun jumlah tersebut masih lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 1990 (Selman, 2009; Wardle dan Robertson, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa tahun 2001 hingga 2004 merupakan jumlah tertinggi AI sepanjang masa dan meskipun menurun di tahun 2005, jumlah AI tetap setara dengan jumlah di tahun 2001 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 1990.

Di antara negara-negara Barat, Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang konsisten dalam menjalankan AI. Tidak hanya konsisten, AS merupakan negara penerima *orphan immigration* terbesar dari tahun ke tahun (Selman, 2014). Jumlah *orphan immigration* ke AS selalu mencakup delapan puluh persen dari jumlah AI secara global (Hogan dan Gibbs dalam Engel, et.al., 2007; Selman, 2002; Wardle dan Robertson, 2013). Meskipun jumlah AI menurun secara global, AS tetap menjadi negara penerima terbesar. Alhasil, relasi AI AS dengan negara pengirim tidak hanya menunjukkan relasi bilateral namun juga mencerminkan posisi negara penerima dan pengirim terbesar secara global.

Posisi AS sebagai negara penerima terbesar menunjukkan intensitas kepentingan AS terhadap isu tentang kesejahteraan anak yatim piatu. Kepedulian AS terhadap yatim piatu bermula dari persuasi pemerintah untuk menyediakan keluarga dan tempat tinggal lebih layak bagi anak-anak korban perang dunia kedua. Persuasi Pemerintah terakomodir oleh globalisasi. Pemerintah turut bekerjasama dengan media massa, agen adopsi, dan organisasi internasional untuk memenuhi pencarian keluarga bagi anak-anak tersebut (Ryan, 2008; Young, 2012). Pemerintah terlihat memiliki peranan besar, namun masih sedikit literatur yang membahas mengenai peranan pemerintah negara dalam AI secara lebih spesifik. Literatur-literatur AI sebagian besar membahas dari segi mikro. Literatur-literatur yang membahas dari perspektif mikro adalah literatur yang membahas tentang tiga serangkai AI, yaitu PAP, anak adopsi, dan keluarga biologis atau keluarga asal. Sedangkan literatur yang membahas dari perspektif makro merupakan literatur yang menjadikan aktor-aktor di luar tiga serangkai tersebut sebagai variabel utama. Baik dari segi mikro maupun makro, pembahasan tentang negara pengirim atau keluarga asal masih sedikit. Gambaran umum tentang perspektif mikro dan makro dapat mengacu pada tulisan Indigo Willing. Willing (2012:1-35) menganalisis literatur Sosiologi yang membahas tentang AI dengan rentang tahun 1997-2010, dan berdasarkan penelitiannya ditemukan bahwa literatur-literatur yang ada didominasi oleh pembahasan tentang PAP dan negara penerima dengan AS yang mendominasi dibandingkan negara Barat lainnya. Oleh karena itu, tulisan ini menambah penelitian dari perspektif makro dengan menggunakan kerangka pemikiran yang berbeda yaitu bantuan kemanusiaan dan diplomasi publik. Dengan menggunakan dua kerangka pemikiran tersebut, maka tulisan ini berupaya menjelaskan kepentingan Pemerintah AS terhadap AI sebagai wujud diplomasi publik untuk mencapai kepentingan ideologi serta menciptakan citra positif kepada pemerintah negara lain dan masyarakat dunia.

Menurut Devon Curtis (2001:3), bantuan kemanusiaan selalu dipengaruhi dengan tingginya intensitas aktivitas politik, dengan kata lain dilandasi kepentingan politik. Bantuan kemanusiaan mempengaruhi ekonomi politik negara resipien (negara penerima bantuan) dan selalu dipengaruhi oleh pertimbangan politik dari *donor governments* (negara pemberi bantuan). Sedangkan humanitarisme tidak memuat kepentingan politik dari *donor governments* karena menganut tiga prinsip utama yang menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan didasarkan pada altruisme penuh. Bantuan kemanusiaan menjadi respon yang lebih disukai untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul akibat perang atau krisis oleh negara-negara paska perang dingin. Dalam perkembangan bantuan kemanusiaan paska perang dingin, negara tidak menjadi satu-satunya aktor. Aktor non negara seperti organisasi internasional maupun individu pun terlibat sebagai pemberi bantuan ketika suatu negara mengalami krisis maupun perang. Paska perang dingin, keterlibatan aktor-aktor non negara semakin meningkat (Duffield dalam Mackintosh, 2000). Selain itu, jumlah NGO yang terlibat dalam perang maupun krisis untuk memberikan bantuan kemanusiaan juga kian meningkat. Jumlah keterlibatan NGO meningkat seiring dengan peningkatan minat mereka dalam memberikan bantuan ketika atau sesudah perang berlangsung (Borton dalam Mackintosh, 2000). Dengan demikian sebagaimana bantuan kemanusiaan dilandasi oleh kepentingan pemerintah, maka AI sebagai bantuan kemanusiaan juga mengandung kepentingan dari *donor government*.

Menurut Joseph Nye (2008:94-109), diplomasi publik bertujuan untuk mempromosikan kekuatan lunak (*soft power*) suatu negara. Tidak hanya itu, diplomasi publik merupakan instrumen penting dalam *smart power*. Karakteristik dari *soft power* adalah tidak menggunakan cara-cara koersif maupun pendanaan melainkan menggunakan cara-cara yang memikat. *Soft power* yang dimiliki suatu negara dapat berasal dari budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan-kebijakan luar negeri. Diplomasi publik adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk memobilisasi sumber-sumber daya dalam berkomunikasi serta memikat publik dari negara lain. Bentuk keberhasilan diplomasi publik adalah ketika individu mengagumi nilai-nilai, meniru tindakan maupun aksi yang dicontohkan, serta mengingini kesejahteraan dan keterbukaan negara tersebut. Teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih menimbulkan standar kredibilitas baru, yaitu informasi.

Berbeda dengan politik kekuatan tradisional yang memandang kredibilitas suatu negara dari kemampuan militer dan ekonomi, saat ini kredibilitas banyak bergantung padainformasi atau narasi mana yang mendominasi dan memikat publik. Nicholas Cull (2009) membagi lima komponen diplomasi publik, diantaranya (1) mendengarkan, (2) advokasi, (3) diplomasi kultural, (5) international broadcasting. Diplomasi publik yang baik memberikan hasil melebihi propaganda. Propaganda merupakan konsep negatif yang bersifat kontra produktif dan berimbas pada rusaknya reputasi atau kredibilitas suatu negara (Nye, 2008). Sedangkan diplomasi publik menyebarkan informasi tentang kebenaran norma masyarakat dan posisi aktual kebijakan luar negeri suatu negara (Brown, 2012). Selain berfungsi untuk menyampaikan informasi dan membentuk citra positif, diplomasi publik juga berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerjasama yang kondusif yang berpengaruh dalam jangka panjang. Untuk membangun hubungan kultural jangka panjang maka diperlukan upaya-upaya berikut ini, diantaranya (1) komunikasi sehari-hari, (2) komunikasi strategis, (3) pengembangan komunikasi jangka panjang dengan memanfaatkan individu-individu secara berkelanjutan selama bertahun-tahun melalui pertukaran, pelatihan, seminar, konferensi, atau akses ke media channels.

Menurut Nye (2008), aksi-aksi dan simbol-simbol memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan hanya melalui kata-kata. Sehingga pertemuan dan komunikasi secara langsung merupakan metode yang efektif dalam diplomasi publik. Pertemuan dan komunikasi tersebut perlu diperkuat dengan internet. Selain itu, dalam diplomasi publik diperlukan keselarasan antara kebijakan dan komunikasi yang diwujudkan dalam kemampuan linguistik yang mumpuni. Apabila representasi pemerintah menunjukkan perilaku dan komunikasi yang tidak selaras dengan kebijakan dan cenderung menggunakan tutur bahasa yang negatif, maka akan memperoleh sejumlah kritikan yang justru merusak kredibilitas negara tersebut. Dengan menggunakan dua kerangka pemikiran tersebut (bantuan kemanusiaan dan diplomasi publik), maka tulisan ini berupaya menjelaskan kepentingan Pemerintah AS terhadap AI sebagai wujud diplomasi publik untuk mencapai kepentingan ideologi serta menciptakan citra positif kepada pemerintah negara lain dan masyarakat dunia.

Analisis

Perubahan sikap AS terhadap adopsi dan *war orphans* seiring dengan meningkatnya keterlibatan AS terhadap peristiwa-peristiwa besar tatanan internasional. Pada tahun 1800-an, adopsi digunakan oleh masyarakat kulit putih untuk menyamakan tindakan perbudakan terhadap anak-anak kulit hitam (Stark, 2017). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya masyarakat AS tidak terbuka terhadap perbedaan dan tidak terbiasa melakukan adopsi dengan memperlakukan anak-anak adopsi setara anak kandung. Kemudian di akhir tahun 1800 dan awal tahun 1900, Pemerintah AS pernah menggunakan kebijakan *American Indian Boarding School* untuk menanamkan budaya Anglo-Amerika kepada anak-anak suku Indian sebagai upaya untuk mencegah disintegrasi nasional akibat perlawanan suku Indian terhadap masyarakat kulit putih (Adams, 1995;Booth, t.t.;DOI, 2012). Di era *American Indian Boarding School*, anak-anak dijadikan sasaran pemerintah untuk menciptakan asimilasi budaya antara Suku Indian dengan masyarakat kulit putih dan budaya Anglo-Amerika. Anak-anak dianggap sebagai sarana terampuh untuk menciptakan integrasi nasional karena karakter anak-anak yang polos dan mudah dibentuk pemikirannya. Pendidikan digunakan untuk menciptakan kesatuan pemahaman serta penyebaran ideologi dan budaya Anglo-Amerika, seperti penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari dan penanaman nilai-nilai ajaran Kristiani (Adams, 1995;DOI, 2012;Lomawaima, 1994). Kebijakan *American Indian Boarding School* tersebut mencerminkan arti penting anak-anak bagi Pemerintah AS untuk mencegah disintegrasi dalam negeri dengan integrasi yang diinginkan oleh Pemerintah AS adalah integrasi dalam budaya Anglo-Amerika sebagai budaya utama masyarakat AS.

Di era Perang Dunia Pertama mulai muncul gerakan-gerakan kemanusiaan yang berfokus pada kesejahteraan *war orphans* dan pada tindakan adopsi berbasis persamaan ras

di dalam masyarakat AS. Gambaran media massa terhadap status anak-anak sebagai *non combatant* dan lemah dalam peperangan selalu berhasil memperoleh perhatian besar dari masyarakat, terlihat dari keberhasilan ACASR dalam mencapai target penggalangan dana yang besar dengan mudah. Penggalangan dana yang dilakukan ACASR berhasil dilakukan karena memanfaatkan sarana dan sasaran yang tepat. ACASR menjalankan penggalangan dana di gereja-gereja dengan membawa poster yang menggambarkan kekacauan yang dialami anak-anak sebagai pihak terlemah dalam peperangan (ACASR, 1918 dalam WDL, 2017). Kedatangan seseorang ke tempat ibadah pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani sebagai manusia yang religius, sehingga penggalangan dana yang dilakukan di gereja-gereja juga bertujuan untuk memanfaatkan sisi sentimental sebagai sesama manusia. Gerakan kemanusiaan yang terjadi di era Perang Dunia Pertama menunjukkan bahwa pemanfaatan sisi sentimental untuk membentuk kesatuan aksi dalam masyarakat selalu menghasilkan pencapaian target yang lebih cepat. Tidak hanya cepat, namun juga berdampak besar dalam jangka waktu yang lama dan lintas bangsa seperti yang terjadi ketika AEF memanfaatkan pemberitaan *war orphans* dalam surat kabar *The Stars and Stripes* untuk meningkatkan solidaritas antara tentara AS dengan tentara Perancis. Selain itu, tindakan AJJDC dan AEF menunjukkan bahwa gerakan-gerakan penyebaran nilai-nilai budaya Anglo-Amerika dimulai oleh masyarakat. Di era Perang Dunia Pertama, Pemerintah AS hanya berperan sebagai (1) fasilitator yang memberikan izin imigrasi kepada anak-anak Yahudi korban Perang Dunia Pertama yang diadopsi oleh PAP AS melalui perantara AJJDC, serta (2) fasilitator penyaluran bantuan masyarakat AS melalui kedutaan-kedutaan yang ada di negara yang berperang.

Di era paska Perang Dunia Kedua, Pemerintah AS mulai terlibat aktif dalam menyelamatkan *war orphans* melalui kebijakan *Displaced Persons Act 1948* dan *Refugee Relief Act 1953* untuk mencapai kepentingan nasional dalam menjaga keamanan perekonomian dan pertahanan komunitas negara-negara NATO akibat krisis pengungsi (De Faria, 2003). Di sisi lain, pengeluaran kebijakan *Displaced Persons Act* juga disebabkan oleh tekanan dari pemerintah negara lain dan *black press* kepada Pemerintah AS untuk bertanggungjawab terhadap ribuan *brown babies* di Jerman Barat. Meskipun tidak ada pernyataan khusus presiden AS yang mengakui *Displaced Persons Act* dan *Refugee Relief Act* sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap perbuatan para tentara AS, namun desakan Presiden Truman kepada Kongres AS untuk segera membentuk Undang-Undang penerimaan pengungsi dan *war orphans* terjadi paska *black press* gencar memberitakan *brown babies* dan Pemerintah Jerman Barat mengeluarkan wacana deportasi. Dengan kata lain Pemerintah AS berupaya untuk meredam gejolak domestik dengan menjalankan aspirasi masyarakat Afrika-Amerika.

Berbeda dari aksi evakuasi *war orphans* di era sebelumnya, *Operation Babylift* menjadi misi khusus pertama penyelamatan *war orphans* yang dilakukan oleh AS. Momentum awal pelaksanaan *Operation Babylift* dinyatakan dalam konferensi pers di *San Diego Convention and Performing Arts Center, California* (Office of the White House Press Secretary, 1975). Presiden Ford secara langsung meminta *National Association of Broadcasters* untuk memberitakan pelaksanaan misi *Operation Babylift*, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan tertulis Office of the White House Press Secretary pada tanggal 7 April 1975. Pernyataan tertulis tersebut menunjukkan bahwa Presiden Ford menyadari peranan penting media dalam membentuk opini publik, oleh karena itu Presiden Ford secara langsung mengarahkan kesatuan sikap media-media AS dalam menyiarkan berita *Operation Babylift*. Jika meninjau tanggal perilisannya maka terlihat bahwa pernyataan tertulis dibuat dua hari paska kegagalan evakuasi pertama C-5A yang menciptakan beragam spekulasi publik dan berkurangnya respek terhadap AS. Melalui pernyataan tersebut, Presiden Ford ingin membentuk kesatuan sikap media AS dengan pemerintah untuk mengembalikan respek publik agar media menyiarkan berita yang tidak membahayakan pertahanan AS sendiri. Penulis menilai bahwa AS memiliki kepentingan yang besar dalam *Operation Babylift* karena semua aspek, dimulai dari media, birokrasi, hingga metode eksekusi diperintahkan secara langsung oleh otoritas tertinggi, yaitu presiden, sehingga *Operation Babylift* pun lekat dengan sosok Presiden Ford.

Melalui konferensi pers di tanggal 3 April dan pernyataan tertulis di tanggal 7 April 1975, Presiden Ford selalu menjunjung tinggi norma kesopanan, terlihat dari penggunaan kata "*permit*" yang berarti memohon izin, baik kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang beranggotakan sebagian besar negara-negara di dunia yang menjunjung tinggi kerjasama dan perdamaian, serta kepada Vietnam Utara sebagai pihak lawan. Selain itu, Presiden Ford menggunakan frasa pengganti seperti "*innocent people*" dan "*less fortunate land*" untuk Vietnam Selatan. Frasa-frasa tersebut mengindikasikan bahwa Presiden Ford berupaya menekankan posisi Vietnam Selatan sebagai pihak yang lemah. Dengan memanfaatkan media, Presiden Ford menjalankan *Operation Babylift* untuk menyebarkan kepentingan ideologi terhadap publik di era perang dingin dengan membentuk citra AS sebagai negara yang menjunjung tinggi integritas, norma kesopanan, suka menolong yang lemah, serta beriman. Melalui analisa penulis terhadap pidato dan pernyataan tertulis Presiden Ford, maka penulis menilai bahwa Presiden Ford memiliki kepentingan besar dalam membentuk citra positif AS di hadapan publik juga untuk menambah respek pemerintah dan masyarakat negara lain paska intervensi militer AS di Vietnam Selatan ketika era kepemimpinan Presiden Nixon.

Tidak hanya sekedar memanfaatkan peranan media, Presiden Ford juga membuat *Operation Babylift* terkesan dramatis. Pada umumnya, operasi militer yang dilakukan MAC menunggu konfirmasi Departemen Luar Negeri yang disampaikan ke Departemen Pertahanan. Departemen Pertahanan menugaskan JCS ataupun U.S. Transportation Command untuk memberi perintah kepada MAC. Namun dalam *Operation Babylift*, Presiden Ford memangkas rantai komando yang panjang dan menyederhanakan birokrasi. Selain itu, NEO merupakan misi penting dan terlihat MAC di lingkungan peperangan, sehingga MAC memperoleh publisitas yang besar ketika melaksanakan NEO (Cross, 1989). Karakteristik MAC dan NEO yang identik dengan publisitas dimanfaatkan oleh Presiden Ford untuk memperoleh atensi besar dari publik yang dapat dibuktikan dari penugasan pesawat kargo besar sayap tinggi C-5A sebagai pesawat pertama yang menjalankan misi *Operation Babylift*. *Operation Babylift* semakin mendapat atensi publik karena merupakan NEO perdana di dunia yang khusus mengevakuasi *war orphans*. Tidak hanya memberikan komando, Presiden Ford bersama istrinya, Betty Ford, juga menyambut kedatangan *war orphans* Vietnam yang juga diliput oleh media.

Berdasarkan analisa penulis terkait AI di era sebelum Pemerintahan George Walker Bush dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, AI baru dijalankan oleh Pemerintah AS setelah merasa kestabilan ekonomi dan pertahanan nasional AS terganggu akibat krisis pengungsi di Eropa, baik berasal dari faktor domestik seperti pemberitaan black press mengenai *brown babies* ataupun faktor eksternal seperti NATO. Kedua, AI dijalankan sesuai kebijakan luar negeri dan ditujukan untuk mendukung kebijakan luar negeri. Poin kedua ini dapat ditinjau dari Refugee Relief Act 1953 dan *Operation Babylift* yang digunakan oleh Pemerintah AS untuk kepentingan ideologi dan diplomasi publik. Selain itu juga dapat dibuktikan dari AI yang dilakukan oleh masyarakat AS di negara-negara "Timur" di akhir Perang Dingin seperti Rumania, Tiongkok, dan Rusia yang menjadikan Tiongkok sebagai negara pengirim terbesar AI (Lovelock, 2000; Masson, 2001; Young, 2012). Ketiga, anak-anak atau *war orphans* digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah AS karena berdasarkan budaya yang berkembang di AS (yang ditinjau dari era Perang Dunia Pertama), anak-anak atau *war orphans* selalu berhasil untuk menghimpun kesatuan aksi dalam masyarakat dan bisa memberikan hasil lebih cepat dan berdampak besar.

Keempat, pemerintah AS konsisten menjalankan AI sebagai bantuan kemanusiaan karena Pemerintah AS percaya karakteristik anak-anak yang polos dan mudah dibentuk pemikirannya menjadi sumber daya manusia yang menambah kekuatan AS (ditinjau dari *American Indian Boarding School* dan pernyataan Presiden Truman tentang imigran). Di sisi lain, AS memiliki lingkungan masyarakat yang lebih terbuka terhadap perbedaan dibandingkan negara-negara Eropa maupun Asia karena merupakan negara imigran (ditinjau dari kasus AJJDC dan *brown babies* Jerman Barat dan Perang Korea), sehingga pemindahan *war orphans* ke AS memperoleh animo PAP yang besar dan lebih mudah untuk diselesaikan dibandingkan di negara-negara Eropa. Kelima, sejarah menunjukkan bahwa AI

berkaitan erat dengan AS karena Pemerintah AS merupakan pemerintah pertama yang membuka diri terhadap para pengungsi dan *war orphans* dari berbagai wilayah di Eropa maupun Asia, yang kemudian memicu reaksi altruisme dari para PAP yang ada di Eropa Barat.

Di tahun 2001 hingga 2009, peran pemerintah AS sebagai promotor AI mulai kembali terlihat paska Presiden Bush mempersuasi masyarakat untuk mengadopsi anak-anak terlantar di panti asuhan. Salah satu wujud perhatian Pemerintah AS di era Presiden Bush terhadap anak-anak yatim piatu adalah kebijakan Adoption Promotion Act yang dihasilkan pada tahun 2003. Berbeda dengan AI yang dijalankan di era sebelum tahun 2001, pada Adoption Promotion Act 2003 tidak memberikan spesifikasi tertentu terhadap *war orphans*, tetapi secara lebih general mempersuasi masyarakat AS untuk melakukan adopsi, baik adopsi domestik maupun AI terhadap anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar. Adoption Promotion Act 2003 merupakan Undang-Undang yang diajukan oleh tiga anggota Kongres AS, yaitu Senator Mary Landrieu, dari negara bagian Louisiana, Senator Jim Oberstar dari Minnesota, dan Dave Camp dari Michigan, yang kemudian diapresiasi dan disetujui oleh Presiden Bush (The White House, 2003). Undang-Undang tersebut meningkatkan kredit pajak dari semula lima ribu dolar di tahun 2001 menjadi sepuluh ribu dolar di tahun 2003 (The White House, 2003). Adoption Promotion Act 2003 merupakan wujud respon Pemerintah AS terhadap peningkatan jumlah aborsi di AS. Pemerintah AS memberikan bantuan dana kepada para PAP yang berinisiatif untuk menjadi PAP bagi anak-anak AS berusia kurang dari sembilan tahun. Salah satu wujud dari Adoption Promotion Act, Pemerintah AS membentuk website adoptuskids.org untuk mempermudah para PAP dalam menjalankan prosedur-prosedur adopsi domestik. Melalui pidato yang disampaikan dalam proses pengesahan Adoption Promotion Act 2003, Presiden Bush mengatakan bahwa:

“In every young life there is a great need to belong. For the sake of our children, this nation has a responsibility to encourage adoption of **children at all ages, from infants to adolescents**. The legislation I’m about to sign today sends a clear message: Our society is building a culture that values every life, and our **government strongly support adoption**. The act of Congress **strongly** affirms our national commitment to adoption, and will **encourage adoption** in every part of our land.” (The White House, 2003).

Pernyataan Presiden Bush tersebut tidak hanya berhasil meningkatkan perhatian masyarakat terhadap adopsi domestik, namun juga meningkatkan perhatian masyarakat AS terhadap AI. Terbukti di tahun 2003 hingga 2004, jumlah AI di AS semakin meningkat. Jumlah AI antara negara pengirim dan negara penerima memiliki pola peningkatan dan penurunan yang sama di setiap tahun. Sepanjang tahun 2004 hingga 2009, jumlah AI secara global mengalami penurunan (Cohen, 2014; Johnston, 2017). Di negara-negara pengirim, pengurangan ketersediaan anak untuk diadopsi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kondisi aging population, isu-isu domestik, dan national pride sebagaimana terjadi di Tiongkok dan Korea Selatan (Budiman dan Lopez, 2017; Young, 2012). Posisi Tiongkok sebagai negara pengirim terbesar AI secara global pada tahun 2005 menjadikan Asia sumber utama AI dengan persentase sebesar lima puluh tiga persen dari total pengiriman anak untuk diadopsi oleh para PAP. Meskipun Asia menjadi sumber utama AI, namun jumlah AI dari negara-negara Asia juga mengalami penurunan. Berbeda dengan negara-negara Afrika yang justru mengalami peningkatan pengiriman secara global sebesar lima belas persen di tahun 2007 (Lih. Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Perbandingan Negara-Negara Pengirim Terbesar Amerika Serikat di Tahun 2000-2009

FREQUENCY OF INTERCOUNTRY ADOPTIONS TO U.S. BY REGION 2000–2009							
	Europe	Asia	Africa	Oceania	America		Total
					North	Central/South	
2000	6911	8639	217	6	1890	2022	18,120
2001	7,637	8,642	343	19	2,015	2,071	19,087
2002	7,796	9,721	337	22	2,750	2,870	21,100
2003	7652	10,018	417	52	2773	2787	21,320
2004	8,158	9,797	580	51	3,869	3,768	22,911
2005	6,591	10,558	812	22	4,261	453	22,710
2006	5,032	9,141	1,303	14	4,682	522	20,705
2007	3,807	8,277	1,748	12	5,166	452	19,471
2008	3,074	6,735	2,315	12	4,630	439	17,229
2009	2,343	5,991	2,722	33	1,325	354	12,782
Total	59,001	87,519	10,794	243	33,361	15,738	195,435

Source: Statistical Yearbooks of the Immigration and Naturalization Service.

Sumber: Davis, 2011.

Di tengah fase penurunan jumlah AI secara global, Presiden Bush mengumumkan kegiatan Bulan Adopsi Nasional (National Adoption Month) sebagai bentuk penghargaan terhadap para PAP dan untuk terus mendorong masyarakat AS berperan aktif dalam mengadopsi anak-anak yatim piatu di AS, sebagaimana dikatakan pada 31 Oktober 2007:

“During National Adoption Month, we recognize the adoptive and foster families who shared their homes and hearts with children in need , and we **encourage more Americans to consider adopting** young people of all ages. During National Adoption Month, we honor adoptive and foster parents as they raise children of conviction and character. By accepting the gift of these children, parents are helping lives and **contributing to the strength of our great Nation.**” (The White House, 2007).

Bulan Adopsi Nasional pun ditetapkan dan diperingati selama satu bulan di setiap bulan November dan ditujukan untuk menjadi wadah bagi masyarakat AS dalam mengetahui lebih lanjut tentang adopsi, terutama tentang adopsi domestik. Sebagai negara penerima AI, bukan berarti AS tidak memiliki anak-anak yatim piatu di panti asuhan yang membutuhkan PAP. Oleh karena itu, Bulan Adopsi Nasional merupakan salah satu wujud apresiasi dan persuasi tahap lanjut kepada para PAP untuk mengadopsi anak-anak yatim piatu di AS, setelah sebelumnya mengeluarkan Adoption Promotion Act di tahun 2003. Sebagai bentuk keberhasilan persuasi adopsi domestik melalui Adoption Promotion Act 2003, jumlah adopsi domestik AS pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2000 (The Economist.com, 2015). Peningkatan jumlah adopsi domestik mengimbangi jumlah AI yang dilakukan oleh PAP AS (The Economist, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa dorongan yang diberikan oleh Pemerintah AS kepada masyarakat untuk berperan aktif mengadopsi anak-anak yatim piatu di AS berhasil memicu munculnya para PAP baru untuk menjalankan adopsi domestik, namun meskipun demikian, animo PAP untuk menjalankan AI tetaplah tinggi.

Bulan Adopsi Nasional pertama kali dibentuk pada tahun 1976 di Massachusetts oleh Gubernur Mike Dukakis. Ketika pertama kali dibentuk, Bulan Adopsi Nasional hanya diperingati selama satu minggu di Massachusetts. Kemudian ide pembentukan Bulan Adopsi Nasional tersebut menyebar ke berbagai wilayah dan mulai diperingati di tingkat nasional setelah Presiden Ronald Reagan memproklamkan Minggu Adopsi Nasional di tahun 1995.

Kemudian di era Presiden Bill Clinton, Minggu Adopsi Nasional diperpanjang menjadi Bulan Adopsi Nasional yang kemudian diperingati setiap tahunnya di bulan November oleh masyarakat AS (Children's Bureau, t.t.). Peningkatan adopsi dari negara-negara Afrika menunjukkan antusiasime PAP AS untuk mengadopsi anak-anak dari Afrika meningkat di tahun 2000 hingga 2009. Beberapa selebriti AS turut mengadopsi anak-anak dari negara-negara Afrika. Angelina Jolie mengadopsi seorang bayi perempuan berusia enam bulan dari Ethiopia pada tahun 2005 yang diberi nama Zahara Jolie-Pitt (CBS News, 2010). Pengadopsian Zahara dilakukan setelah sebelumnya pada tahun 2002, Jolie mengadopsi seorang bayi laki-laki berusia tujuh bulan dari Kamboja. Tidak hanya Jolie, selebriti AS yang turut mengadopsi anak-anak dari Afrika adalah Maddona. Maddona mengadopsi sepasang bayi kembar dari Malawi pada tahun 2009. Pengadopsian yang dilakukan oleh para selebriti AS tersebut memberikan pengaruh terhadap penyebaran berita di media massa maupun internet mengenai adopsi dari negara-negara Afrika, sehingga animo masyarakat AS untuk mengadopsi anak-anak dari negara-negara Afrika semakin meningkat. Jolie memiliki peranan besar dalam penyebaran berita tentang kondisi anak-anak di negara Afrika, terutama karena pada tahun 2001, Angelina Jolie direkrut oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai Duta Persahabatan PBB. Perekrutan tersebut dilakukan paska Jolie menyampaikan ketertarikan pada isu-isu tentang pengungsi kepada UNHCR, sebagaimana disampaikan oleh Jolie ketika diwawancarai oleh jurnalis IRIN mengenai motivasinya untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan UNHCR di tempat pengungsian:

“I have always been curious about the UN, and so I got a book and sat up one night reading about the different chapters of the UN and stopped on the refugee section. I learned what a refugee was, that twenty million people around the world were refugees, and how fifty percent of these refugees were under eighteen. **I wanted to find out** how I had gone my whole life without learning about this or hearing much about it on the news, so **I called UNHCR in Washington.**” (IRINnews.org, 2003).

UNHCR merekrut Jolie karena peranan Jolie sebagai selebriti dapat memperoleh atensi besar dari masyarakat, sehingga ketertarikan dan keinginan untuk menjadi Duta Persahabatan PBB dianggap oleh UN High Commissioner for Refugees, Ruud Lubbers, mampu menjadi sarana untuk memberikan edukasi kepada publik mengenai kehidupan para pengungsi di pengungsian (UNHCR, 2001). Tidak hanya melakukan perjalanan ke tempat pengungsian, Jolie juga mengabadikan misinya dalam jurnal-jurnal yang turut dipublikasi dalam website www.usaforunhcr.org (UNHCR, 2001). Peranan Jolie sebagai selebriti sekaligus Duta Persahabatan PBB menjadikan Jolie memperoleh predikat sebagai salah satu dari “The Most Powerful Celebrity” oleh berbagai majalah Forbes dari AS yang kemudian diberitakan oleh media massa dari berbagai negara seperti The Telegraph dari Inggris (Singh, 2009). Dengan status Jolie sebagai “The Most Powerful Celebrity”, maka kehidupan pribadinya pun tidak luput dari pemberitaan media massa, sehingga ketertarikannya pada AI yang terwujud dalam pengadopsian anak dari Kamboja dan Ethiopia semakin memperoleh perhatian publik. Tidak hanya mengadopsi dari Kamboja dan Ethiopia, pada tahun 2006, Jolie mengadopsi anak dari panti asuhan di Vietnam (Stringer, 2007). Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah AI sebagai bantuan kemanusiaan di sepanjang tahun 2001 hingga 2009 dipengaruhi oleh peranan para selebriti.

Meskipun peninjauan dari segi wilayah menunjukkan hanya wilayah Afrika yang mengalami peningkatan jumlah, namun jika dikerucutkan lebih lanjut, terdapat dua negara di luar negara-negara Afrika yang juga mengalami peningkatan jumlah pengiriman anak di sepanjang tahun 2004 hingga 2007, yaitu Guatemala dan Vietnam (Selman, 2009). Guatemala dan Vietnam termasuk dalam sepuluh besar negara pengirim terbesar bagi AS, dengan Guatemala berada pada posisi kedua dan Vietnam berada pada posisi kelima. Peningkatan jumlah AI dari negara-negara Afrika juga terjadi di AS. Jika dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya, Ethiopia menjadi satu-satunya negara pengirim terbesar dari Afrika yang mengalami peningkatan jumlah secara konsisten di AS. Hal

tersebut membuat Guatemala, Vietnam, dan Ethiopia menjadi negara pengirim terbesar AS yang mengalami peningkatan jumlah di sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2007 (Lih. Tabel 3.2). Meskipun begitu, Pemerintah AS memiliki sikap berbeda terhadap Guatemala, Vietnam, dan Ethiopia.

Tabel 3.2 Perbandingan Negara-Negara Pengirim Terbesar AI bagi AS di Tahun 2004-2007

Country	2004	2005	2007	Total change 2004-7	Change 2004-7 (%)
Total sent to 23 receiving states	45,288	43,857	37,526	7762	-17
Countries sending fewer children					
China	13,404	14,493	8753	-4651	-35(-40)^a
Russia	9425	7471	4873	-4552	-48
Korea	2258	2101	1265	-993	-44
Total for 3 countries	25,087	24,065	14,891	-10,196	-41
Countries sending more children^b					
Guatemala	3424	3857	4844	+1420	+41.5
Ethiopia	1527	1778	3031	+1504	+98.5
Vietnam	483	1190	1692	+1209	+250
Total for 3 countries	5434	6555	9567	+4133	+76

Sumber: Selman, 2009.

Perbedaan sikap Pemerintah AS terhadap Guatemala, Vietnam, dan Ethiopia dapat ditinjau dari larangan pengadopsian anak-anak Guatemala dan Vietnam di tahun 2008 sebagai dampak dari pengimplementasian HCIA ke dalam hukum nasional oleh AS. HCIA adalah tonggak perjanjian internasional yang khusus membahas tentang prosedur formal yang diakui oleh berbagai negara di dunia (Burton, 2007). Sebanyak enam puluh enam negara menandatangani HCIA pada tahun 1993, yang berarti sebagian besar negara pengirim dan negara penerima AI menyetujui HCIA (Bartholet, 2005). Negara-negara yang menandatangani HCIA menunjukkan ketertarikan untuk meratifikasi ke dalam hukum nasional namun tidak diwajibkan untuk mengimplementasikan HCIA tersebut ke dalam hukum nasional. AS turut menjadi negara yang menandatangani HCIA pada tanggal 31 Maret 1994 dan secara resmi bergabung sebagai negara anggota HCIA pada 12 Desember 2007, namun HCIA baru diimplementasikan ke dalam hukum nasional pada tanggal 1 April 2008 (Long, 2009; Wardle dan Robertson, 2013). Salah satu kewajiban yang harus ditempuh oleh negara-negara anggota HCIA adalah pembentukan badan otoritas pusat yang berwenang mengatur praktik, kebutuhan ratifikasi agen-agen adopsi, menjadi badan yang mengatur dan menerima pendaftaran, keluhan, dan menciptakan sistem untuk lembaga penegak hukum yang tidak memenuhi standard. Di AS, Departemen Luar Negeri adalah otoritas pusat yang berwenang sebagai fasilitator bagi para stakeholder sesuai dengan standard HCIA (Long, 2009). Sebagai bentuk pengimplementasian HCIA, AS menghasilkan U.S. Legislation for the Hague Adoption Convention, sehingga mulai tahun 2008, sistem AI di AS diatur sesuai dengan U.S. Legislation for the Hague Adoption Convention dan

Intercountry Adoption Act of 2000 (IAA) (Bureau of Consular Affairs, t.t.). IAA memiliki tujuan serupa dengan HCIA yaitu untuk melindungi hak-hak dan mencegah pelanggaran terhadap anak-anak, keluarga asal, dan PAP (Wardle, t.t.).

AS menjalankan AI selaras dengan prinsip utama HCIA, yaitu AI untuk kepentingan terbaik anak atau yang dikenal dengan prinsip *best interest of the child*. Prinsip *best interest of the child* menjadikan regulasi adopsi bagi para PAP semakin susah dan mahal, namun di sisi lain semakin transparan. Oleh karena itu HCIA dianggap oleh beberapa orang sebagai aksi paling ambisius dan monumental untuk memenuhi perlindungan anak, keluarga asal, dan PAP dari perdagangan anak dan pelanggaran lain (Carlberg, 2007). Salah satu kewajiban yang harus ditegakkan oleh AS adalah larangan untuk mengambil keuntungan dari praktik adopsi ataupun pembayaran yang diberikan kepada orang tua.

Peningkatan jumlah AI dari Guatemala harus berakhir di tahun 2008 setelah Pemerintah Guatemala mendapat tekanan untuk memperbaiki regulasi dan kualitas agen adopsinya dari PBB dan negara-negara penerima AI yang melihat realita bahwa praktik AI Guatemala merupakan bentuk perdagangan dan penculikan anak, bahkan AI menjadi sumber pemasukan terbanyak kedua bagi Guatemala setelah ekspor pisang (BBC News, 2008; Jennings, 2012; Martinez dan Goldman, 2008; Smith, 2007). Guatemala mengakses HCIA pada 12 Agustus 2003, namun tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Kondisi demikian membuat Guatemala semakin memperoleh tekanan untuk segera meratifikasi dan menerapkan HCIA ke dalam hukum nasional. Pemerintah AS termasuk yang memberikan tekanan besar terhadap Pemerintah Guatemala. Disampaikan melalui Catherine Barry, Deputy Assistant Secretary for Overseas Citizens, bahwa AS tidak mengadopsi dari Guatemala apabila Guatemala tidak memberlakukan HCIA ke dalam hukum nasionalnya pada saat AS menerapkan perjanjian tersebut (Clemetson, 2007). Pada tahun 2007, kantor imigrasi AS di Guatemala menolak mengesahkan visa untuk adopsi karena praktik AI Guatemala dianggap salah dan tidak etis (Departemen Luar Negeri dalam Herman, 2007). Tekanan-tekanan yang diberikan menyebabkan Guatemala berhenti memproses permintaan AI di tahun 2008 sembari Pemerintah Guatemala meninjau semua isu kasus perdagangan anak yang terjadi (Voigt dan Brown, 2013).

Tidak jauh berbeda dengan Guatemala, Vietnam juga mengalami tekanan akibat isu penculikan anak secara paksa untuk diperdagangkan. AS termasuk negara yang gencar memberikan tekanan. Isu-isu perdagangan anak di Asia Tenggara serta posisi Vietnam yang belum menjadi negara anggota HCIA menimbulkan larangan adopsi dari Vietnam oleh Pemerintah AS di tahun 2008. Tidak terima dengan tuduhan Pemerintah AS, Pemerintah Vietnam berhenti menerima permohonan adopsi dari PAP AS pada 1 Juli 2008 (Agence France Presse, 2014; BBC News, 2008; Jordan, 2017). Berakhirnya relasi AI antara AS dengan Vietnam menyebabkan penurunan jumlah pengiriman Vietnam ke negara-negara lain pada tahun-tahun berikutnya, meskipun sempat meningkat di tahun 2009 (Gibbons dalam Jennings, 2012; Voigt dan Brown, 2013). Larangan AI dari Guatemala dan Vietnam tersebut menjadikan Ethiopia sebagai satu-satunya negara pengirim terbesar yang mengalami peningkatan jumlah AI bagi AS. Perbedaan sikap terhadap Ethiopia tersebut semakin memperkuat indikasi bahwa terdapat kepentingan Pemerintahan AS di era Presiden Bush yang ingin dicapai melalui AI.

Ketika AI mulai menjadi tren bantuan kemanusiaan di tahun 1970-an, masih sedikit permintaan terhadap adopsi dari negara-negara Afrika oleh negara-negara Barat kecuali dari Perancis. Permintaan untuk adopsi paling banyak berasal dari Perancis, sedangkan pengiriman untuk ke negara lain seperti AS dan Spanyol hanya mencapai satu persen dari total pengiriman yang dilakukan oleh Ethiopia. Peningkatan adopsi dari negara-negara Afrika di abad keduapuluhsatu dianggap sebagai bentuk pencarian alternatif terhadap regulasi AI yang semakin ketat dari negara-negara pengirim maupun penerima paska menerapkan HCIA. Terhitung hingga 2010, negara-negara yang meratifikasi HCIA hanyalah Burkina Faso, Mauritius, Burundi, Afrika Selatan, Guinea, Madagaskar, Mali, Kenya, Seychelles, Cape Verde dan Togo. Ethiopia menjadi satu dari enam negara Afrika yang tidak meratifikasi HCIA (ACPF, 2012).

Meskipun terjadi peningkatan adopsi dari negara-negara Afrika secara global, namun AS tidak selalu menjadi negara penerima terbesar bagi setiap negara tersebut. Bagi Afrika Selatan, AS merupakan negara penerima terbesar kedelapan di sepanjang tahun 2003 hingga 2009 (Selman, 2014). Lima negara penerima terbesar AI dari Afrika Selatan secara berurutan dari yang terbesar, yaitu Denmark, Swedia, Belanda, Finlandia, dan Belgia. Tidak hanya Afrika Selatan, bagi Mali, AS tidak termasuk dalam lima negara penerima terbesar karena AS berada pada posisi terbesar keenam pada tahun 2003 hingga 2009 (Selman, 2014). Dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya, Ethiopia merupakan negara pengirim AI terbesar, bahkan jumlah pengiriman yang dilakukan mencapai lebih dari lima puluh persen jumlah pengiriman adopsi negara-negara Afrika (Selman, 2014). Dalam kondisi Ethiopia yang memiliki latar belakang serupa dengan Guatemala dan Vietnam, terutama karena Ethiopia bukan negara anggota HCIA, perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah AS mengindikasikan kepentingan Pemerintah AS terhadap Ethiopia yang hendak dicapai melalui AI. Oleh karena AI dijalankan sesuai dan untuk mendukung kebijakan luar negeri, maka untuk menjelaskan perbedaan sikap terhadap Ethiopia tersebut, penulis menjelaskan lebih lanjut relasi AI AS dan Ethiopia dengan mengawali pada peranan kebijakan luar negeri AS dan kondisi domestik di era Pemerintahan George Walker Bush.

Kebijakan luar negeri AS di tahun 2004 hingga 2009 memiliki misi utama serupa dengan periode pertama pemerintahan George Walker Bush pada tahun 2001 hingga 2004. Kebijakan luar negeri AS di periode pertama Presiden Bush berfokus pada Global War on Terror sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan terorisme yang menyerang gedung World Trade Organization (WTO) di tanggal 11 September 2001. AS memperoleh ancaman dan ujaran kebencian dari para teroris, sehingga serangan teroris menimbulkan stigma negatif terhadap kondisi keamanan nasional AS. Sebagai bentuk perlawanan terhadap terorisme dan stigma negatif yang ditimbulkan bagi AS, Presiden Bush meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung pembangunan negara-negara miskin. Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Bush dalam konferensi internasional di Mexico pada 22 Maret 2002:

“Many here today have devoted their lives to the fight against global poverty, and you know the stakes. We fight **against poverty** because hope is an **answer** to terror. We fight against poverty because opportunity is a fundamental right to poverty with a growing conviction that major progress is within our reach. We will **challenge** the poverty and hopelessness and lack of education and failed governments that too often allow conditions that terrorist can seize and try to turn their advantage.” (un.org, 2002).

Menurut Presiden Bush, peningkatan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara miskin perlu dilakukan dengan maksimal untuk mencapai kebebasan ekonomi, kebebasan politik, serta supremasi hukum dan hak asasi manusia karena bantuan tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap pengurangan aksi-aksi terorisme di dunia (un.org, 2002). Bantuan kemanusiaan dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan dan menanamkan demokrasi sebagai ideologi dan nilai-nilai budaya AS. Dalam konferensi internasional di Mexico yang diselenggarakan oleh PBB dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara di dunia, Presiden Bush menggerakkan negara-negara maju untuk turut serta memberikan bantuan kepada negara-negara miskin. Presiden Bush mengusulkan beberapa bentuk bantuan kemanusiaan, diantaranya (1) Millennium Challenge Account (MCA) untuk memberikan bantuan keuangan sebesar lima miliar dolar per tahun kepada beberapa pemerintah negara terpilih yang berkuasa adil, memberikan investasi kepada masyarakat, serta menganut kebebasan ekonomi, (2) rencana darurat untuk penanggulangan AIDS, (3) dana darurat AS untuk krisis kompleks negara lain, (4) penambahan empat belas ribu pasukan penjaga perdamaian sukarela untuk meningkatkan keamanan masyarakat internasional (*peace corps*), (5) bantuan dana untuk mencegah dan merespon kelaparan di negara-negara miskin (Peters dan Wolley, t.t.). Tidak hanya memberikan bantuan keuangan kepada negara resipien, Presiden Bush memandang

pentingnya pemberian bantuan pendidikan maupun pemberdayaan terhadap warga negara negara resipien karena akal dan kemampuan manusia adalah sumber daya paling vital bagi negara (un.org, 2002). Rencana peningkatan pemberian bantuan kemanusiaan menunjukkan bahwa Presiden Bush menyadari pentingnya penggunaan smart power untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman (Radelet, 2003).

Misi bantuan kemanusiaan di era Presiden Bush tersebut menggambarkan tujuan utama diplomasi AS didasarkan pada keyakinan dasar bahwa kebebasan, kemakmuran, dan keamanan AS terlindungi jika kebebasan, kemakmuran, dan keamanan dunia tercipta, sehingga AS memiliki tanggungjawab yang besar untuk menggunakan kekuatannya secara konstruktif untuk memajukan keamanan, demokrasi, dan kemakmuran di seluruh dunia (Departemen Luar Negeri AS, 2003). Untuk menunjang misi tersebut, Departemen Luar Negeri dan USAID menjadi institusi yang berperan penting. Pada tahun 2001 hingga 2009, USAID mengeluarkan kebijakan rencana strategis untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dengan menunjang perbaikan kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kondisi-kondisi lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan populasi global. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan global melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan, negara-negara sub-sahara Afrika adalah negara-negara yang menjadi sasaran utama bantuan kemanusiaan AS karena negara-negara tersebut adalah negara-negara yang terinfeksi virus HIV dan AIDS terbanyak. Untuk membantu negara-negara Afrika dalam mencegah peningkatan infeksi virus HIV dan AIDS, AS membentuk U.S. President's Emergency Plan For AIDS Relief (PEPFAR), yang kemudian pada periode kedua pemerintahan Presiden Bush terus dijalankan. AS berupaya mengurangi masalah-masalah yang memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik yang mengganggu perkembangan pembangunan di negara-negara miskin yang terhambat akibat infeksi virus HIV dan AIDS. Wanita dan anak-anak menjadi sasaran utama USAID untuk memberikan tindakan terintegrasi penanganan HIV dan AIDS yang dimulai dari pencegahan, pengobatan, dan perawatan (USAID, 2003). Presiden Bush menjadi presiden yang menjalankan kunjungan kerja terbanyak di Afrika dibandingkan era-era sebelumnya (Human Rights Watch, 2003).

Presiden Bush gencar mencari sumber bantuan untuk melawan AIDS di negara-negara Afrika. Aktor-aktor non negara seperti badan-badan amal berbasis agama turut terlibat dalam menghimpun bantuan untuk mendukung kebijakan Presiden Bush mencegah dan mengobati HIV dan AIDS khususnya bagi anak-anak yatim piatu. Setiap kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Bush diliput oleh media. Seperti salah satunya ketika melakukan kunjungan ke Zambia pada 1 Desember 2007. Bantuan yang diterima dari misionaris Kristen di Zambia yang tergabung dalam Bridget Chisenga of Catholic Relief Service mendapat apresiasi dari Presiden Bush. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Presiden Bush dalam mengurangi penyebaran virus HIV dan AIDS khususnya untuk anak-anak dari Afrika. Dalam kunjungannya ke Zambia, Presiden Bush mengatakan bahwa:

“It is in **our moral interest**. It lifts our spirits and souls to help **neighbors** in need, whether it's a **neighbor** across the street or a neighbor in the global community.” (The Washington Post, 2007).

Lebih khususnya pada tahun 2001, Departemen Luar Negeri AS memberikan bantuan keuangan untuk mewujudkan program-program *anti trafficking* untuk melindungi para korban dari pelaku-pelaku yang menganiaya. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) memberikan bantuan kepada Ethiopia berupa bantuan keuangan kepada NGO Good Samaritan Association untuk mencegah dan mengurangi krisis perkosaan yang ada di Ethiopia dengan menyediakan badan konsultasi hukum bagi para korban perkosaan (INL, 2001). Diantara negara-negara Afrika, Ethiopia merupakan negara yang paling banyak menerima bantuan kemanusiaan dari AS, dengan sebesar tujuh persen dari total bantuan (ODA, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa Ethiopia memiliki ketergantungan yang besar terhadap AS. Tidak hanya itu, AI dari Ethiopia menunjukkan peningkatan di tahun 2010, ketika ke negara-negara penerima lainnya mengalami penurunan (Lih. Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Perbedaan Jumlah Pengiriman Anak Adopsi Antar Negara-Negara Penerima Terbesar dari Ethiopia di Tahun 2008-2010

ETHIOPIA TAHUN 2008-2010			
6 Negara Penerima Terbesar	2008	2009	2010
Amerika Serikat	1.725	2.277	2.513
Perancis	484	445	352
Spanyol	629	722	508
Italia	338	348	274
Belgia	127	143	120
Kanada	177	145	100
Total Pengiriman	3.480	4.080	3.867

Sumber: Selman, 2014.

Tabel di atas membuktikan bahwa AI antara Ethiopia dan AS memiliki relasi dibandingkan dengan negara-negara penerima lainnya. Hal tersebut terkait dengan status Ethiopia sebagai negara penerima bantuan kemanusiaan terbesar dari AS. Peningkatan di tahun 2010 kian mengonfirmasi bahwa sikap berbeda terhadap Ethiopia terjadi karena AS sedang berinvestasi bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar di Ethiopia, sehingga memerlukan bantuan masyarakat AS ataupun NGO untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan bantuan kemanusiaan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa AI digunakan oleh pemerintah AS untuk mencapai kepentingan nasional. Di era perang dunia kedua, Pemerintah AS secara aktif terlibat dalam pemindahan pengungsi dan *war orphans* di wilayah sekutu di Eropa Barat paska pengesahan Displaced Persons Act pada tahun 1948. Kebijakan Displaced Persons Act tersebut menyebabkan pemindahan ribuan *brown babies* dari Jerman Barat dan menjadikan Jerman sebagai sumber AI terbesar bagi AS di era Perang Dunia Kedua. Displaced Persons Act dibentuk untuk menciptakan kestabilan komunitas internasional terutama negara-negara NATO. Kemudian pada tahun 1953, Pemerintah AS membentuk Refugee Relief Act yang memiliki jangkauan lebih luas untuk memindahkan pengungsi dan *war orphans*, baik dari negara-negara Komunis maupun negara yang menjadi wilayah kontestasi perang dingin antara negara-negara Timur dan negara-negara Barat, sehingga menjadikan *brown babies* dari Korea Selatan sebagai sumber AI terbesar bagi AS di era Perang Dingin.

Berbeda dengan kebijakan Displaced Persons Act dan Refugee Relief Act, misi *Operation Babylift* merupakan wujud diplomasi publik, setelah sebelumnya intervensi militer dalam Perang Vietnam di era Presiden Nixxon menuai kontra dari berbagai pihak termasuk kubu internal AS sendiri. *Operation Babylift* menjadi bentuk agenda setting Pemerintah AS karena seluruh media massa AS secara langsung dikontrol oleh Presiden Ford yang terbukti dari persuasi kepada National Association of Broadcasters untuk bersinergi bersama Pemerintah AS dalam menciptakan pemberitaan yang menunjang integritas Pemerintah AS terhadap bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada para *war*

orphans Vietnam. *Operation Babylift* tidak hanya berhasil mempersuasi masyarakat AS untuk terlibat mengadopsi para *war orphans* Vietnam, namun juga berhasil mempersuasi masyarakat dari berbagai negara di Eropa Barat. Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Nye bahwa bentuk keberhasilan diplomasi publik adalah ketika individu mengagumi nilai-nilai, meniru tindakan maupun aksi yang dicontohkan, serta menginginkan kesejahteraan dan keterbukaan negara tersebut, maka keinginan adopsi para *war orphans* yang dievakuasi dalam misi *Operation Babylift* menunjukkan keberhasilan Pemerintah AS dalam diplomasi publik. Keberhasilan diplomasi publik tersebut sekaligus menunjukkan bahwa anak-anak merupakan instrumen politik yang kuat bagi pemerintah.

Pada era Pemerintahan George Walker Bush, AI kembali digunakan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional sekaligus simbolisasi tentang nilai-nilai keterbukaan dan perdamaian AS. Meskipun tidak ada pernyataan verbal maupun tertulis presiden untuk mempersuasi masyarakat AS melaksanakan AI sebagai bantuan kemanusiaan sebagaimana dilakukan oleh presiden-presiden AS di era sebelumnya, namun Presiden Bush menciptakan kondisi nasional yang mendukung terlaksananya AI sebagai bantuan kemanusiaan. Presiden Bush menunjukkan sikap terbuka terhadap tindakan adopsi serta menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak yatim piatu maupun anak-anak terlantar di negara lain. AI dari negara-negara Afrika mengalami peningkatan di era Presiden Bush pasca kebijakan luar negeri AS memiliki misi utama untuk memerangi HIV dan AIDS yang sebagian besar menjangkit negara-negara di Afrika. Peningkatan bantuan kemanusiaan serta kunjungan Presiden Bush terhadap anak-anak Afrika semakin mengangkat dan memperkenalkan isu tentang kondisi anak-anak di Afrika. Adopsi dari negara-negara Afrika semakin menjadi tren di kalangan masyarakat pasca para selebriti terlibat dalam aksi adopsi anak-anak dari negara Afrika. Kepentingan Pemerintah AS dalam AI mulai terlihat jelas ketika menunjukkan perbedaan sikap antara Guatemala, Vietnam, dan Ethiopia. Larangan yang tidak diberikan kepada Ethiopia mencerminkan sikap khusus terhadap Ethiopia.

Berdasarkan analisis penulis, sikap khusus terhadap Ethiopia merupakan hasil dari misi utama Pemerintah AS dalam membantu anak-anak yatim piatu terlantar dan perempuan-perempuan di Afrika dari penyebaran virus HIV dan AIDS. Dengan kata lain, AI dari Ethiopia tidak dilarang agar masyarakat AS turut terlibat untuk membantu Pemerintah AS menanggulangi persoalan HIV dan AIDS di negara-negara Afrika. Hal tersebut menunjukkan upaya pelibatan masyarakat AS dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik di Afrika sebagai bagian dari misi besar menyebarkan nilai-nilai demokrasi untuk melawan terorisme. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa argumentasi penulisan dalam tulisan ini terbukti karena Pemerintah AS menjalankan AI untuk membentuk citra positif dan menyebarkan nilai-nilai budaya serta ideologi AS kepada publik karena anak-anak sebagai instrumen politik selalu berhasil memperoleh animo besar dalam masyarakat AS serta masyarakat dari negara lain. Selain itu, penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa AI terus dijalankan sebagai bantuan kemanusiaan oleh Pemerintah AS karena AI memberikan hasil yang ekstra menguntungkan bagi AS yang tidak hanya menjangkau masyarakat AS dan masyarakat negara lain saja, tetapi juga pemerintah dari negara lain, dimana negaranya tersebut menjadi sasaran pemenuhan kepentingan nasional AS, seperti Ethiopia. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa AI menjadi wujud diplomasi publik AS yang berhasil dalam tatanan internasional.

Daftar Pustaka

Artikel Daring

- Agence France Presse. 2014. "Vietnam, US Restart Adoption After Six Year Ban". Tersedia dalam <http://www.hurriyetdailynews.com/vietnam-us-restart-adoptions-after-six-year-ban-71781>. Diakses pada 19 April 2018 [daring]
- BBC News. 2008. "Guatemala Halts Foreign Adoptions". Tersedia dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7385122.stm>. Diakses pada 20 April 2018 [daring]
- Budiman, Abby dan Mark Hugo Lopez. 2017. "Amid Decline in International Adoptions to U.S., Boys Outnumber Girls For the First Time". Tersedia dalam <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/10/17/amid-decline-in-international-adoptions-to-u-s-boys-outnumber-girls-for-the-first-time/>. Diakses pada 24 April 2018 [daring].
- CBS News. 2010. "Stars Who Adopt as Single Moms". Tersedia dalam <https://www.cbsnews.com>. Diakses pada 2 Juni 2018 [daring].
- Cohen, Philip N. 2014. "International Adoption, Rise and Fall". Tersedia dalam <https://familyinequality.wordpress.com/2014/05/12/international-adoption-rise-and-fall/>. Diakses pada 20 April 2018 [daring].
- Children's Bureau. T.t. *What/When is National Adoption Month?*. Tersedia dalam <https://www.acf.hhs.gov/cb/faq/adoption14>. Diakses pada 4 Juni 2018 [daring]
- Clemetson, Lynette. 2007. "Adoptions From Guatemala Face an Uncertain Future". Tersedia dalam <https://www.nytimes.com/2007/05/16/us/16adopt.html>. Diakses pada 23 April 2018 [daring]
- Curry, Elizabeth. 2016. "Why The Decline in International Adoptions?" Tersedia dalam <https://adoption.com/why-the-decline-in-international-adoptions>. Diakses pada 18 April 2018 [daring]
- Deutsche Welle staff. 2004. Romania Bans Foreign Adoption. Tersedia dalam <http://www.dw.com/en/romania-bans-foreign-adoptions/a-1243642>. Diakses pada 18 April 2018 [daring]
- Encyclopaedia Britannica. 2018. "George Frost Kennan". Tersedia dalam <https://www.britannica.com/biography/George-F-Kennan>. Diakses pada 22 Mei 2018 [daring]
- Halamandaris, Bill. 2014. "Operation Baby Lift: The Story Behind the Story". Tersedia dalam https://www.huffingtonpost.com/bill-halamandaris/operation-baby-lift-the-s_b_5113981.html. Diakses pada 26 April 2018 [daring]
- Herman, Ken. 2007. "Adoptions in Guatemala Face U.S. Ban". Tersedia dalam http://articles.chicagotribune.com/2007-03-01/news/0703010214_1_adoption-central-american-nation-ethan. Diakses pada 2 Juni 2018 [daring]
- Human Rights Watch. 2003. "President Bush's Trip to Africa". Tersedia dalam <https://www.hrw.org/news/2003/07/02/president-bushs-trip-africa>. Diakses pada 2 Juni 2018 [daring]
- Smith, Allen Brisson. 2007. "Adoption From Guatemala Face an Uncertain Future". Tersedia dalam <https://www.nytimes.com/2007/05/16/us/16adopt.html>. Diakses pada 2 Juni 2018 [daring]
- IRIN. 2003. "Interview With UNHCR Goodwill Ambassador Angelina Jolie". Tersedia dalam www.irinnews.org. Diakses pada 2 Juni 2018 [daring]
- Johnston, Wm. Robert. 2017. "Historical International Adoption Statistics, United States and World". Dalam [<http://www.johnstonsarchive.net/policy/adoptionstatsintl.html>]. Diakses pada 12 Maret 2018 [daring]
- Jordan, Miriam. 2017. "Overseas Adoptions by Americans Continue to Decline". Tersedia dalam <https://www.nytimes.com/2017/04/13/us/overseas-adoptions-decline.html>. Diakses pada 18 April 2018 [daring]
- Martinez, Haroldo dan Russel Goldman. 2008. "U.S. Adoption Fueled By Guatemalan Kidnapping". Tersedia dalam

- <http://abcnews.go.com/International/story?id=4787761&page=1>. Diakses pada 19 April 2018 [daring]
- Mather, Mark. 2014. "The Decline in U.S. Fertility". Dalam [<http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2014/2014-world-population-data-sheet/us-fertility-decline-factsheet.aspx>]. Diakses pada 11 Maret 2018 [daring]
- McCarthy, Niall. 2016. "International Adoption Have Declined Dramatically". Tersedia dalam <https://www.statista.com/chart/5489/international-adoptions-have-declined-dramatically/>. Diakses pada 18 April 2018 [daring]
- Motich, Elizabeth. M. 2015. "Orphans of the Front in World War I". Tersedia dalam <https://rememberingwwi.villanova.edu/orphans/>. Diakses pada 21 Mei 2018 [daring]
- O'Hara, Mary. 2017. "Why Is Intercountry Adoption Declining?". Tersedia dalam <https://www.theguardian.com/social-care-network/2017/may/25/why-is-intercountry-adoption-declining>. Diakses pada 17 April 2018 [daring]
- Reuters. 2007. "Angelina Jolie Applies to Adopt Vietnamese Orphan". Tersedia dalam <https://www.reuters.com/article/us-jolie/angelina-jolie-applies-to-adopt-vietnamese-orphan-idUSL0320469820070306>. Diakses pada 2 Juni 2018 [daring]
- Roman, Stacy. 2018. "Rationalizing Ration Cards in Germany". Tersedia dalam <https://europe.stripes.com/pcs/rationalizing-ration-cards-germany>. Diakses pada 25 Mei 2018 [daring]
- Singh, Anita. 2009. "Angelina Jolie is World's Most Powerful Celebrity". Tersedia dalam <https://www.telegraph.co.uk>. Diakses pada 2 Juni 2018 [daring]
- The Bibliography.com. 2017. "Franklin D. Roosevelt Biography". Tersedia dalam <https://www.biography.com/people/franklin-d-roosevelt-9463381>. Diakses pada 3 Mei 2018 [daring]
- The Biography.com. 2018. "John J. Pershing". Tersedia dalam <https://www.biography.com/people/john-j-pershing>. Diakses pada 22 Mei 2018 [daring]
- UNHCR. T.t. "UNHCR Goodwill Ambassador Angelina Jolie". Tersedia dalam www.unhcr.org. Diakses pada 2 Juni 2018 [daring]
- USA for UNHCR. 2001. "About Us: USA For UNHCR". Tersedia dalam www.unrefugees.org. Diakses pada 2 Juni 2018 [daring]
- Voigt, Kevin dan Sophie Brown. 2013. "International Adoptions in Decline as Number of Orphans Grows". Tersedia dalam <http://edition.cnn.com/2013/09/16/world/international-adoption-main-story-decline/index.html>. Diakses pada 19 April 2018 [daring]

Buku Elektronik

- Briggs, Laura. 2003. "Mother, Child, Race, Nation: The Visual Iconography of Rescue and the Politics of Transnational and *Transracial adoption*" dalam *Gender & History*, Vol. 15 No. 2. Oxford: Blacwell Publishing Ltd., hlm. 197-200.
- Berridge, GR. 2010. "Diplomacy Theory and Practice 4th ed.". Plagrove Macmillan: Hampshire.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2007. "Transformasi Isu dan Aktor di Dalam Hubungan Internasional: Dari Realism Hingga Konstruktivisme". Dalam Iva Rachmawati. *Diplomasi Publik: Meretas Jalan Bagi Harmoni Dalam Hubungan Antarneegara*. Yogyakarta: Calpulis, 2016, hlm. 15.
- Kennan, George F. 1951. *American Diplomacy 1900-1950*. London: The University of Chicago Press.
- Spielvogel, Jackson. 2008. "Western Civilization: A Brief History". Dalam Connie IP. *The Division of Eastern and Western Europe*. Tersedia dalam [http://www.coldwar.hu/html/en/publications/Day%201%20Panel%202%20Connie%20Ip%20The%20Division%20of%20Eastern%20and%20Western%20Europe%20\(Mount%20Holyoke%20College\).pdf](http://www.coldwar.hu/html/en/publications/Day%201%20Panel%202%20Connie%20Ip%20The%20Division%20of%20Eastern%20and%20Western%20Europe%20(Mount%20Holyoke%20College).pdf). Diakses pada 20 April 2018.
- Sudiharto. 2007. *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Pendekatan Keperawatan Transkultural*, diedit oleh Esty Whayuningsih. Jakarta:EGC.

Willing, Indigo, et.al. 2012. *Review of Sociological Literature on Intercountry Adoption*. Cambridge University Press, hlm. 1-35.

Buku

Chadwick, Bruce A, et.al. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: IKIP Semarang Press, hlm. 270.

Rachmawati, Iva. 2016. *Diplomasi Publik: Meretas Jalan Bagi Harmoni Dalam Hubungan Antarnegara*. Yogyakarta: Calpulis.

Tansill, Charles Callan. 1952. *Back Door To War : The Roosevelt Foreign Policy 1933-1941*. USA: Greenwood Press.

Xinran. 2010. *Message From An Unknown Chinese Mother*. Great Britain: Chatto and Windus, hlm. 36-53.

Disertasi

Jennings, Katherine. 2012. *The Dilemma of Guatemalan Adoptions: The Hague Convention, the CNA, and the Future of Adoptions in Guatemala*. Central Virginia: Liberty University, hlm. 1-39.

Dokumen Pemerintah

AEF. 1919. *The Stars and Stripes, Volume 1, Number 48, January 3, 1919*. Tersedia dalam https://www.wdl.org/en/item/18029/#additional_subjects=Orphans. Diakses pada 21 Mei 2018 [daring]

AJJDC. 1921. *Jewish War Orphans Arrive in the United States*. Tersedia dalam https://www.wdl.org/en/item/17336/#additional_subjects=Orphans. Diakses pada 20 Mei 2018.

American Committee for Relief in the Near East. 1917. *"The Child at Your Door" 400.000 Orphans Starving, No State Aid Available, Campaign for \$30.000.000*. Tersedia dalam <https://www.wdl.org/en/item/4526/#q=orphan+at+your+door&qla=en>. Diakses pada 20 Mei 2018 [daring]

American Committee for Relief in the Near East. 1918. *Lest They Perish, Campaign for \$30.000.000, American Committee for Relief in the Near East: Armenia-Greece-Syria-Persia*. Tersedia dalam <https://www.wdl.org/en/item/4603/#>. Diakses pada 20 Mei 2018 [daring]

Casey, MGEN M.F. 1975. *Orphans Evacuation Program-Vietnam/Cambodia*. USAF: DOD Orphan Lift Coordinator.

Chachoin, Imp. H. 1918. *1778-1783 America Owes France The Most Unalterable Gratitude. 1917- ... French Comrade, Your Children Shall Be as Our Children. America Ouwroir Funds*. Tersedia dalam <https://www.loc.gov/resource/cph.3f04017/>. Diakses pada 22 Mei 2018 [daring]

Cross, Coy F. 1989. *MAC and Operation Babylift: Air Transport in Support of Noncombatant Evacuation Operations*. Illinois: Military Airlift Command Scott Air Force Base, hlm. 1-64.

Ford, Gerald R.. 1975. *Text of Remarks of the President to the National Association of Broadcasters*. Las Vegas: Office of the White House Press Secretary.

Gerald Ford Museum.T.t. *President and Mrs. Ford Carrying Vietnamese Children during "Operation Babylift"*. Tersedia dalam <https://www.fordlibrarymuseum.gov/museum/exhibits/babylift/photography/>. Diakses pada 30 Mei 2018 [daring]

Parker, Daniel. 1975. *Memorandum for Honorable Theodore C. Marrs: A.I.D. Efforts to Airlift Vietnamese Orphans to the United States*. Washington: Department of State.

The White House. 2003. *President Bush Signs the Adoption Promotion Act of 2003*. Tersedia dalam <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/12/20031202-1.html>. Diakses pada 2 Juni 2018 [daring]

- U.S. Department of State: Office of Children's Issues (2003). Tersedia dalam <http://travel.state.gov/adopt.html>. Diakses pada 24 April 2018 [daring]
- U.S. Department of Interior. 2012. *Fort Spokane Educator's Guide*. Lake Roosevelt National Recreation Area.
- World Digital Library. T.t. *About the World Digital Library*. Tersedia dalam <https://www.wdl.org/en/about/>. Diakses pada 20 Mei 2018 [daring]

Dokumen Lembaga Non Pemerintah

- Dwight D. Eisenhower: "Statement by the President Upon Signing the Refugee Relief Act of 1953". Dalam Gerhard Peters dan John T. Woolley, *The American Presidency Project*. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=9668> [daring]
- GovTrack. 2004. H.R. 8193 (83rd): *An Act to Amend the Refugee Relief Act of 1953*. Tersedia dalam <https://www.govtrack.us/congress/bills/83/hr8193/text>. Diakses pada 28 Mei 2018 [daring]
- Harry S. Truman: "Statement by the President Upon Signing the Displaced Persons Act," June 25, 1948. Dalam Gerhard Peters dan John T. Woolley, *The American Presidency Project*. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=12942>. Diakses pada 27 Mei 2018 [daring]
- _____: "Special Message to the Congress on Aid for Refugees and Displaced Persons.," March 24, 1952. Dalam Gerhard Peters and John T. Woolley, *The American Presidency Project*. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=14435>. Diakses pada 27 Mei 2018 [daring]
- Johnson, John H. 1955. "Ostracized Korea *Brown babies*". Dalam *Jet Magazine* Vol. 7 No. 20, edisi 24 Maret 1955, hlm. 17.
- _____. 1955. "State Department Seeks to Help". Dalam *Jet Magazine* Vol. 7 No. 20, edisi 24 Maret 1955, hlm. 16.
- Libraries University of Wisconsin. 2011. *Lucien Hector Jonas (1880-1947): World War I Pictorials*. Tersedia dalam <https://www.library.wisc.edu/memorial/2011/10/01/lucien-hector-jonas-1880-1947-world-war-i-pictorials/>. Diakses pada 22 Mei 2018 [daring]
- Nunn, William C. 1948. "*Brown babies' Need Help*". Dalam *Pittsburgh Courier* edisi 29 Mei 1948. Dikutip oleh Yara-Colette Lemke De Faria. 2003. "Germany's '*Brown babies*' Must Be Helped! Will You": U.S. Adoption Plans for Afro-German Children, 1950-1955. *Callaloo*, Vol. 36. No. 2 (Spring, 2003), hlm. 342-362
- Taft, William Howard. 1916. "The Proposal for a League to Enforce Peace: Affirmative". Dalam *Faculty Scholarship Series Paper 3939*. Yale Law School, hlm.1-20.

Jurnal

- Adams, David Wallace. 1995. *Education for Extinction: American Indians and The Boarding School Experience, 1875-1928*. Lawrence: University of Kansas Press.
- Agaje, Solomon Worku. 2008. *Resilience Among Children Exposed to Traumatic Loss*. Masteroppgave: University of Oslo, hlm 1-59.
- Bartholet, Elizabeth. 2005. "Children and Youth in Adoption, Orphanages, and Foster Care". Diedit oleh Lori Askeland. *International Adoption*. Greenwood Publishing Group Inc., hlm. 107-131.
- Berger, P. Dan T. Luckman. 1967. "The Social Construction of Reality". Dalam Indigo Willing, et.al. *Review of Sociological Literature on Inter-country Adoption*. Cambridge University Press, 2012, hlm. 3.
- Bockley, Kathryn M. 1995. "A Historical Overview of Refugee Legislation: The Deception of Foreign Policy in the Land of Promise". Dalam *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation* Volume 21 Number 1, hlm.254-291.
- Booth, Tabatha Toney. T.t. *Cheaper Than Bullets: American Indian Boarding Schools and Assimilation Policy, 1890-1930*. University of Central Oklahoma.
- Borton, J., et.al. 1994. "NGOs and Relief Operations: Trends and Policy Implications". Dalam Kate Mackintosh. *The Principles of Humanitarian Action in International*

- Humanitarian Law*. Overseas Development Institute: Humanitarian Policy Group, 2000, hlm. 1.
- Brookfield, T. 2009. "Maverick Mothers and Mercy Flights: Canada's Controversial Introduction to International Adoption". Dalam Indigo Willing, et.al. *Review of Sociological Literature on Intercountry Adoption*. Cambridge University Press, 2012, hlm. 5-6.
- Brown, John. 2012. "Public Diplomacy and Propaganda: Their Differences". Tersedia dalam http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2002_07-09/brown_pubdipl/brown_pubdipl.html. Diakses pada 9 Mei 2018 [daring]
- Cull, Nicholas. 2009. "Public Diplomacy: Lessons From The Past". Dalam *CPD Perspective on Public Diplomacy*. Los Angeles, hlm. 12.
- Curtis, Devon. 2001. *Politics and Humanitarian Aid: Debates, Dilemmas, and Dissension*. Overseas Development Institute: Humanitarian Policy Group, hlm. 3.
- Davis, Mary Ann. 2011. *Intercountry Adoption Flows From Africa to the U.S.: A Fifth Wave of Intercountry Adoption*. Center for Migration Studies of New York, hlm. 784-811.
- Davies, Miranda. 2011. *Intercountry Adoption, Children's Rights, and The Politics of Rescue*. Adoption and Fostering Volume 35 Number 11, hlm.50-62.
- De Faria, Yara-Colette Lemke. 2003. "'Germany's 'Brown babies' Must Be Helped! Will You": U.S. Adoption Plans for Afro-German Children, 1950-1955". Dalam Callaloo, Vol. 36. No. 2 (Spring, 2003), hlm. 342-362.
- Dickens, Jonathan. *Social Policy Approaches to Intercountry Adoption*. International Association of Schools of Social Works, 2009, hlm. 595-607.
- Duffield, M. 1998. "Aid Policy and Post Modern Conflict: A Critical Review". Dalam Kate Mackintosh. *The Principles of Humanitarian Action in International Humanitarian Law*. Overseas Development Institute: Humanitarian Policy Group, 2000, hlm. 1.
- Engel, Madeline, et.al. 2007. "International Adoption: a Sociological Account of The US Experience". Dalam Indigo Willing, et.al. *Review of Sociological Literature on Intercountry Adoption*. Cambridge University Press, 2012, hlm. 8-9.
- Engel, Madelin, et.al. 2007. *International Adoption: A Sociological Account of the US Experience*. International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 27 Iss 5/6, hlm. 257-270.
- Geiss, Margaret L. T.t. "Tour of Newspaper Representatives". Dalam Yara-Colette Lemke De Faria. 2003. "Germany's 'Brown babies' Must Be Helped! Will You": U.S. Adoption Plans for Afro-German Children, 1950-1955. Callaloo, Vol. 36. No. 2 (Spring, 2003), hlm. 342-362.
- Gibbons, Judith, et.al. 2012. "Foster Parents as A Critical Link and Resource in International Adoptions From Guatemala". Dalam Katherine Jennings. *The Dilemma of Guatemalan Adoptions: The Hague Convention, the CNA, and The Future of Adoptions in Guatemala*, hlm. 8.
- Giddens, Anthony. 1998. "The Third Way". Diedit oleh Monica Dowling dan Gill Brown, hlm. 5. Walton Hall: Open University, 2008.
- Groza, Victor dan Kelley Mc Creery Bunkers. 2013. *The United States as a Sending Country for Intercountry Adoption: Birth Parents' Rights Versus the 1993 Hague Convention on Intercountry Adoption*. Tersedia dalam <http://www.tandfonline.com/loi/wado20>. Diakses pada 21 April 2018.
- Gunsberg, L. 2010. "An Invitation Into The Ghost Kingdom". Dalam Indigo Willing, et.al. *Review of Sociological Literature on Intercountry Adoption*. Cambridge University Press, 2012, hlm. 2.
- Hagima, Razvan. 1989. *The Transition and Privatization Processes in Romania*. CES Working Papers Volume VI, Issue 3, hlm. 36-42.
- Hocking, Brian. 1998. "The End(s) of Diplomacy". Dalam International Journal Vol. 53, No. 1 (Winter 1997/1998).
- Hogan, M. Dan P. Gibbs. 2004. "Hague Intercountry Adoption Regulations Released". Dalam Madeline Engel, et.al. *International Adoption: A Sociological Account of the*

- US Experience*. International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 27 Iss 5/6, 2007, hlm. 263.
- Högbacka, Riitta. 2000. *Intercountry Adoption and The Social Production of Abandonment*. International Social Work, Finland: University of Helsinki, hlm. 1.
- Huschka, Denis dan Gert G. Wagner. 2009. *Naming Differences in Divided Germany*. Tersedia dalam <https://www.researchgate.net/publication/228911223>. Diakses pada 24 Mei 2018 [daring].
- Ittig, Maureen. *A Family Perspective on Transracial Adoption*. Madison: University of Wisconsin, t.t., hlm. 1-13.
- Lammers, Meredith. 2008. *The Culture of Adoption in the United States as Compared to France and Belgium*. The Ohio State University, hlm. 1-72.
- Lomawaima, K. Tsianina. 1994. *They Called It Praire Light: The Story of Chilocco Indian School*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Lovelock, Kirsten. 2000. "Intercountry Adoption as a Migratory Practice: A Comparative Analysis of Intercountry Adoption and Immigration Policy and Practice in the United States, Canada, and New Zealand in the Post World War II Period". Dalam *International Migration Review* 34:3, hlm. 907-949.
- Mackintosh, Kate. *The Principles of Humanitarian Action in International Humanitarian Law*. Overseas Development Institute: Humanitarian Policy Group, 2000, hlm.4.
- Masson, Judith. 2001. "Intercountry Adoption: A Global Problem or a Global Solution?" Dalam *Children: Challenges and Projects for the New Millenium*. Journal of International Affairs, Vol. 55, No.1, hlm 141-166.
- Nuechterlein, Donald E. 1976. *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making*. Dalam *British Journal of International Studies*, Vol. 2, No. 3, hlm 246-266.
- Nye, Joseph. S. 2008. "Public Diplomacy and Soft Power". Dalam *ANNALS, AAPS*, 616, hlm. 94-109.
- Riggs, D.W. 2012. "Intercountry Adoption and The Inappropriate/d Other: Refusing The Disappearance of Birth Families". Dalam *Indigo Willing, et.al. Review of Sociological Literature on Intercountry Adoption*. Cambridge University Press, 2012, hlm. 2.
- Ryan, Chantel. 2008. *Intercountry Adoption: Past, Present, and Future Concerns Regarding its Existance and Regulation*. Tersedia dalam <http://www5.austlii.edu.au/au/journals/AUJIGendLaw/2008/4.pdf>. Diakses pada 20 April 2018, hlm 132-188.
- Sarah Jackson-Han. 1999. "Chinese Moves Put Foreign Adoption in Doubt". Dalam *The Politics Of Adoption Across Borders: Whose Interest Are Served?: A Look At The Emerging Market of Infant From China*, diedit oleh Michelle Van Leeuwen, hlm. 190. Pasific Rim Law And Policy Association.
- Selman, Peter. 1999. "The Demography of Intercountry Adoption". Dalam Peter Selman. *Intercountry Adoption in The New Millenium: The Quiet Migration*, hlm. 214.
- _____. 2002. "Intercountry Adoption in The New Millenium: The Quiet Migration" revisited. Dalam *Population Research and Policy Review* 21, hlm. 205-225.
- _____. 2006. "Trends in Intercountry Adoption: Analysis of Data from 20 Receiving States, 1998-2004". Dalam *Journal of Population Research* 23-2 Special Issue on "Globalization and Demographic Change", hlm. 183-204.
- _____. 2009. "The Rise and Fall of Intercountry Adoption in the 21 Century". Dalam *International Social Work*, hlm. 575-594. Tersedia dalam <http://isw.sagepub.com/content/52/5/575>. Diakses pada 15 April 2018. [daring]
- Simon, R. J. dan H. Altstein. 2000. "Adoption Across Borders: Serving the Children in Trans-racial and Inter-country Adoptions". Dalam *Indigo Willing, et.al. Review of Sociological Literature on Intercountry Adoption*. Cambridge University Press, 2012, hlm. 5.
- Stark, Barbara. 2017. *When Genealogy Matters: Intercountry Adoption, International Human Rights, and Global Neoliberalism*. Harvard Law School: Institute for Global Law and Policy.

- Wardle, Lynn D dan Travis Robertson. 2013. *Adoption: Upside Down and Sideways? Some Causes of and Remedies For Declining Domestic and International Adoption*. Hawaii: Brigham Young University, hlm. 209-270.
- Wardle, Lynn. D. T.t. *The Hague Convention on Intercountry Adoption and American Implementing Law: Implications For International Adoptions by Gay and Lesbian Couples or Partners*. Brigham Young University, hlm 113-152.
- Young, Alexandra. 2012. "Developments in Intercountry Adoption From Humanitarian Aid to Market-Driven Policy and Beyond". Dalam *Adoption and Fostering Volume 36 Number 2 2012*, hlm.67-78.

Jurnal Dalam Buku

- Crawford, Neta. 2010. "Jurgen Habermas". Dalam Iva Rachmawati. *Diplomasi Publik: Meretas Jalan Bagi Harmoni Dalam Hubungan Antarnegara*. Yogyakarta: Calpulis, 2016, hlm. 15.

Laporan Penelitian

- ACPF. 2012. *Africa: The New Frontier for Intercountry Adoption*. Addis Ababa: The African Child Policy Forum.
- Bennett, Marian, et.al. *Report Aspects of Intercountry Adoption Law*. Dublin: Law Reform Commission, 2008, hlm. 5.
- Cantwell, Nigel. 2014. *The Best Interest of the Child in Intercountry Adoption*. Florence: UNICEF Office of Research, hlm. 77.
- DeBruyne, Nese F. 2017. *American War and Military Operations Casualties: Lists and Statistics*. Congressional Research Service, hlm. 1-34.

Tesis

- Pretorious, Rina-Louise. 2011. "Polyteralism as Diplomatic Method". Dalam *The Case If Kimberly Process 2000-2002*. University of Pretoria.

Video Dokumenter

- Anderson, Jen. "The Dying Rooms-Documentary From 1995" Youtube, 2013. [daring]. Tersedia dalam https://youtu.be/zd_nptd2qoM. [Diakses pada 5 Maret 2018].
- Tomlin, Janice. 1993. *20/20 Take Me To America: Romanian Orphanage*. Chalcedon Ministry, 40:14 minutes.

Lain-lain

- INL. 2001. *The U.S. Government's International Anti-Trafficking in Persons Initiatives*. Tersedia dalam USA.gov. Diakses pada 4 Juni 2018 [daring]
- Setiawan, Ehta. 2012. *KBBI Online*. Kemdikbud: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Sirusa BPS. 2018. *Angka Kelahiran Total (TFR)*. Tersedia dalam <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=49>. Diakses pada 19 April 2018 [daring]
- UNICEF. 2015. *Intercountry Adoption*. Tersedia dalam https://www.unicef.org/media/media_41918.html. Diakses pada 24 April 2018.
- United Nations. 2003. *Handbook of the Collection of Fertility and Mortality Data*. Tersedia dalam [http://data.un.org/Glossary.aspx?q=Total+fertility+rate+\(live+births+per+woman\)](http://data.un.org/Glossary.aspx?q=Total+fertility+rate+(live+births+per+woman)). Diakses pada 19 April 2018.
- U.S. Department of State. T.t. *Intercountry Adoption From A to Z*. Tersedia dalam <https://travel.state.gov/content/travel/en/Intercountry-Adoption.html>. Diakses pada 19 April 2018 [daring]
- US Legal Definition. 1997. *International Adoption*. Dalam [<https://definitions.uslegal.com/i/international-adoption/>]. Diakses pada 24 April 2018 [daring]

_____. 1997. *Prospective Adoptive Parent Law and Legal Definition*. Dalam [<https://definitions.uslegal.com/p/prospective-adoptive-parent/>]. Diakses pada 11 Maret 2018 [daring]